

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA

DI DESA TENGKURAK, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

FISHERIES BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH AGRARIAN REFORM ACCESS MANAGEMENT IN TENGKURAK VILLAGE, SERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE

Eva Hutri Sinaga¹, Egi Massardy², Tri Yulianto³

¹Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia

²Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Banten, Indonesia

³Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kab. Serang, Provinsi Banten, Indonesia

Koresponden e-mail: eva.koizora@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Desa Tengkurak sebagian besar menggantungkan kelangsungan hidupnya sebagai nelayan karena sebelah utara desa berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Mereka memanfaatkan penggunaan tanah sebagai tambak ikan sebagai upaya meningkatkan sumber usahanya. Namun, adanya hambatan terkait kekurangan modal serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam bidang usaha perikanan menyebabkan para nelayan terpaksa mengandalkan pengepul ikan untuk menjual hasil tangkapannya meskipun secara mandiri sebetulnya mereka bisa lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengurai permasalahan di Desa Tengkurak melalui akses reforma agraria dengan penyuluhan, dan mengembangkan kemampuan berinovasi serta mendorong terbentuknya kelompok usaha seperti koperasi sebagai wadah pengembangan potensi masyarakat khususnya bagi para nelayan. Metode penelitian menggunakan kualitatif analisis deskriptif dengan sumber data wawancara dan observasi kepada para nelayan. Hasil dari penelitian ini adanya bentuk kerja sama serta pola komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah terutama dalam pembentukan koperasi guna mengembangkan hasil usaha mikro kecil menengah (UMKM) perikanan tanpa mengandalkan pengepul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat Desa Tengkurak dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, diharapkan masyarakat dapat mampu mengelola UMKM dan mempromosikan hasil usahanya secara mandiri terutama para nelayan.

Kata kunci : nelayan, reforma agraria, desa tengkurak

ABSTRACT

Most of the people in Tengkurak Village depend on fishing for their livelihood, as the village is bordered by the Java Sea to the north. They use land for fish ponds in an effort to increase their business resources. However, the lack of capital and inadequate infrastructure in the fisheries business sector has forced fishermen to rely on fish collectors to sell their catch, even though they could do better independently. The purpose of this study is to try to unravel the problems in Tengkurak Village through access to agrarian reform with counseling, Focus Group Discussion (FGD), and developing the ability to innovate and encourage the formation of business groups such as cooperatives as a forum for community potential development, especially for fishermen. The research method used qualitative

descriptive analysis with data sources from interviews and observations of fishermen. The results of this study show that there is a form of cooperation and communication patterns between the community and the local government, especially in the formation of cooperatives to develop the results of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) fisheries without relying on collectors. The conclusion of this study is that with good cooperation between the Tengkurak Village community and the local government and related agencies, it is expected that the community will be able to manage SMEs and promote their business results independently, especially fishermen.

Keywords : *fishermen, agrarian reform, tengkurak village*

I. PENDAHULUAN

Secara geografis, pantai mendominasi wilayah-wilayah di Indonesia sehingga budidaya perikanan merupakan salah satu sektor kelautan yang memberikan kontribusi cukup tinggi dalam memenuhi permintaan pasar internasional. Oleh karena itu pemerintah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi untuk pengembangan budidaya perikanan di Indonesia.

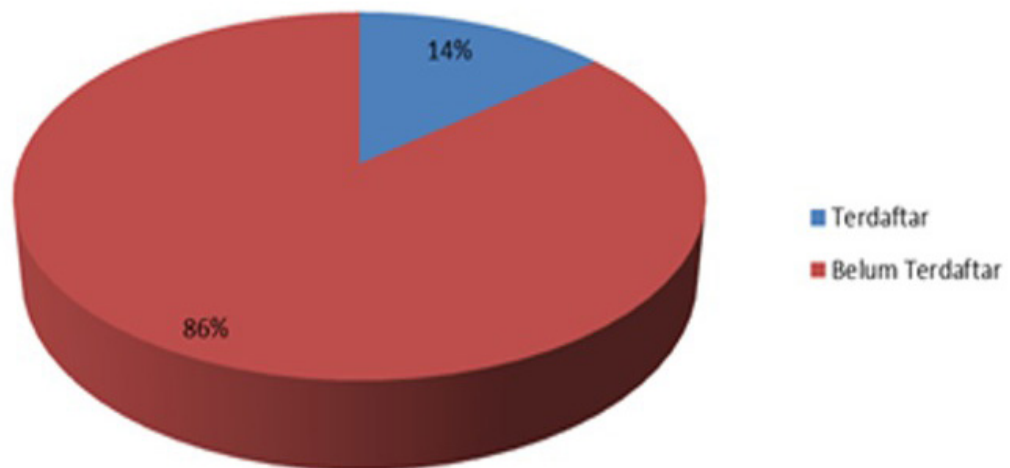
Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa segala sumber daya alam yang ada dikuasai dan diolah oleh negara serta dipergunakan semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari lahirnya undang-undang tersebut adalah membangun dan memperkuat serta mengelola sumber daya alam di Indonesia sehingga menciptakan kemakmuran masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki komitmen dalam mewujudkan tanah demi keadilan hidup rakyat dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Namun, terbatasnya ketersediaan lahan merupakan salah satu pemicu terbentuknya permukiman di wilayah pesisir atau pantai karena ingin dekat dengan tempat bekerja. Permukiman tanpa status hak apapun yang berdiri di atas tanah negara merupakan hak negara dan negara secara sah menguasai atas daerah perairan pesisir tersebut (Sinabariba et al., 2022).

Sebagaimana penguasaan perairan pada permukiman penduduk di perairan pesisir dengan status hukum berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 dijelaskan bahwa hak atas tanah meliputi permukaan bumi yang berada di bawah air maupun yang ada di daratan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang dimaksud

adalah daratan yang membentang sepanjang tepian pantai, dengan lebar proporsional bentuk dan kondisi fisik minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini serupa dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pada Pasal 5 dijelaskan garis sempadan sungai besar ditentukan paling sedikit berjarak seratus meter dari tepi kanan dan kiri palung sungai sepanjang alur sungai.

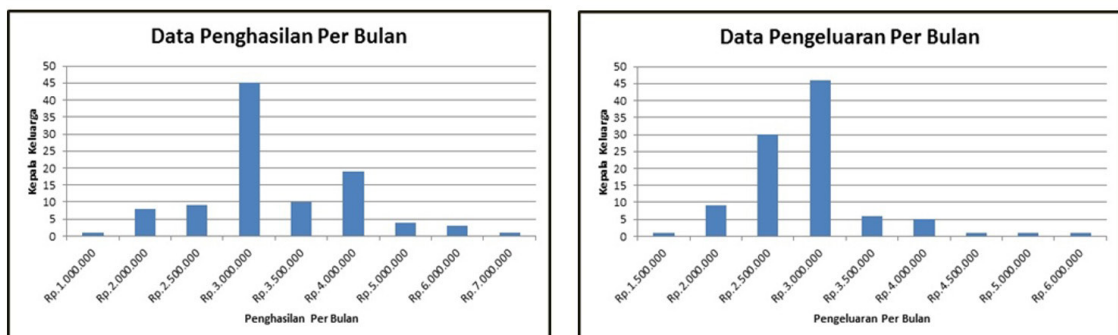
Berdasarkan hal tersebut Kementerian ATR/BPN melaksanakan reforma agraria dalam penataan aset (*asset reform*) sebagai kegiatan sertifikasi hak atas tanah/legalisasi aset sehingga adanya kepastian hukum hak atas tanah, sementara penataan akses (*access reform*) dilaksanakan dengan memberikan akses terhadap sumber ekonomi berupa modal, usaha, produksi, dan pasar. Seperti yang dilansir oleh media *online* fajarbanten.com (Kamis, 21/09/2023) dijelaskan bahwa salah satu sasaran lokasi atas pelaksanaan reforma agraria tersebut adalah Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten karena merupakan desa yang masuk dalam program Redistribusi Tanah Tahun 2022.

Masyarakat Desa Tengkurak sebagian besar menggantungkan kelangsungan hidupnya sebagai nelayan karena sebelah utara desa berbatasan langsung dengan laut Jawa, mereka memanfaatkan penggunaan tanah sebagai tambak ikan sebagai upaya meningkatkan sumber usahanya. Namun, berdasarkan hasil pemetaan sosial dari 100 kepala keluarga (KK) pelaku usaha di Desa Tengkurak dengan tanah terdaftar hanya 14 KK atau sekitar 14% dan sisanya 86 KK atau 86% pelaku usaha belum mendaftarkan tanah miliknya (Gambar 1) karena kesulitan dalam melengkapi data secara administrasi.



Sesuai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Laporan Perekonomian Provinsi Banten pada bulan Agustus 2022 disebutkan bahwa indikator keberhasilan dalam membangun kualitas penduduk suatu wilayah dilihat dari segi hasil pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Komponen kesejahteraan keluarga yang meliputi pendapatan keluarga dari masing-masing sektor usaha untuk memenuhi kebutuhan

pangan dan nonpangan Kabupaten Serang mencapai 66,82 masuk pada kategori “sedang”. Fenomena tersebut menggambarkan relatif tingginya kesenjangan kualitas hidup di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, faktanya keadaan tersebut terjadi di Desa Tengkurak dengan data pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp3.000.000,- sampai dengan Rp4.000.000,- dengan data pengeluaran sebesar Rp2.500.000,- sampai dengan Rp3.000.000 per bulan (Gambar 2).



Sumber: Laporan Agustus Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kegiatan ARA Tahun 2023)

Gambar 2 Grafik Penghasilan dan Pengeluaran Penduduk Desa Tengkurak per Bulan

Gambar 2 menggambarkan kondisi aktual mengenai hambatan dan kendala penduduk Desa Tengkurak dilihat secara ekonomi. Sebagian besar nelayan kekurangan modal untuk pemenuhan sarana alat tangkap serta peralatan tambak, sehingga memaksa para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pengepul dengan harga yang relatif rendah. Salah satu alasan sulitnya memberikan dana bantuan oleh lembaga keuangan atau bank kepada petambak disebabkan oleh adanya penerapan sistem jaminan/ agunan fisik seperti bangunan dan tanah (Boa,

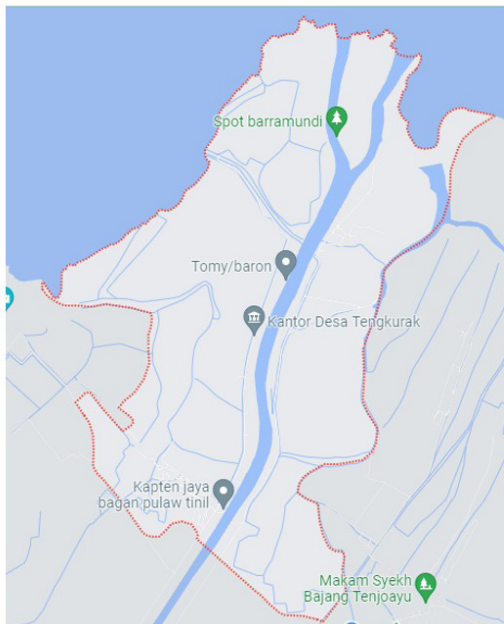
2007). Kehidupan nelayan merepresentasikan bahwa kurangnya pengetahuan sosial membentuk akar bagi kemiskinan nelayan, sehingga seperti sebuah siklus akan terus berulang. Pengetahuan berbasis kapitalisasi, perubahan formasi sosial, bentuk-bentuk perlawanan terhadap pemilik modal, jerat hutang berbasis patron-klien yang eksploitatif, gaya hidup boros yang melemahkan kemampuan investasi dan pembentukan modal, terbentuknya stigma sosial negatif sebagai kelompok yang tidak dapat dipercaya, merupakan dinamika representasi sosial (Wijaya & Fauzie, 2020).

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi membutuhkan intervensi pendampingan sehingga berpengaruh signifikan terhadap pengembangan serta kemajuan usaha yang dikelola (Hamdani et al., 2020). Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan usaha nelayan melalui akses reforma agraria di Desa Tengkurak Kabupaten Serang Provinsi Banten dilihat dari perspektif komunikasi bisnis dan organisasi.

II. METODE

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pemetaan sosial dalam penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Februari hingga bulan Agustus 2023 di Desa Tengkurak, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa Tengkurak merupakan desa yang masuk dalam program Redistribusi Tanah Tahun 2022, yang juga memiliki potensi perikanan untuk dapat dikembangkan sebagai pemasukan pendapatan penduduk (Gambar 3).



Sumber: <https://www.google.com/maps/place/Tengkurak>

Gambar 3 Peta Desa Tengkurak, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

B. Metode Pengumpulan Data

Metode kegiatan ini menggunakan kualitatif analisis deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa penyuluhan. Kegiatan pelatihan, pendampingan dan evaluasi merupakan suatu bentuk penyuluhan perikanan (Mitra, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Akses Reforma Agraria sebagai Pemberdayaan dan Pendampingan Usaha Masyarakat

Kementerian ATR/BPN memiliki program dalam pemberdayaan tanah masyarakat yang biasa disebut dengan penanganan akses reforma agraria, program ini bertujuan untuk menggerakkan kelompok masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuatan bahkan potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga digunakan untuk mengatasi persoalan yang menjadi masalah pada wilayah tersebut. Hal tersebut juga dapat membantu pemerintah dalam membentuk pemberdayaan tanah masyarakat guna mendukung legalisasi aset tanah masyarakat dan dapat digunakan serta dimanfaatkan secara maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sasaran kegiatan penanganan akses reforma agraria diantaranya adalah masyarakat yang tanahnya sudah, belum dan dalam proses penataan aset serta masyarakat yang tanahnya dimanfaatkan untuk usaha atau kegiatan perekonomian. Dalam pelaksana penanganan akses reforma agraria perlu ditetapkannya lokasi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini penetapan tersebut sudah ditetapkan oleh Tim Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 60/SK-36.04.NT.02.02/II/2023, salah satu lokasi desa/kelurahan yang menjadi penetapan akses reforma agraria adalah Desa Tengkurak. Desa Tengkurak merupakan salah satu desa di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan sebagian besar masyarakat Desa Tengkurak mengenyam pendidikan hanya di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

Hasil kegiatan pemetaan sosial pada 100 kepala keluarga di Desa Tengkurak menggambarkan secara umum bahwa hambatan serta kendala pada sektor perikanan lebih kepada cuaca, kekurangan

modal, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai (Tabel 1). Hal ini, mengilustrasikan perlu adanya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pemberdayaan yang berkaitan dengan sektor usaha, dimana pendampingan sosial merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan promosi sehingga dari sektor perekonomian hal tersebut mampu memperluas jaringan dengan konsumen dan dapat menentukan sebuah keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Rachman & Rosyanti, 2023).

Sebagaimana dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Tengkurak belum pernah menerima program bantuan apapun dari pemerintah yang menyangkut bidang usaha yang tengah dijalani, dalam hal ini adalah sektor perikanan sebagai nelayan dengan usaha tambak.

Tabel 1 Data Kendala/Hambatan Bidang Usaha

No	Bidang Usaha	Jml KK	Hambatan
1	Nelayan Tambak	55	Cuaca, kekurangan modal, abrasi, minim peralatan, dan akses jalan,
2	Nelayan Tangkap	27	Cuaca, kekurangan modal, akses jalan, dan kurangnya sarana alat tangkap
3	Pengrajin Dendeng Ikan	2	Cuaca, kekurangan modal, dan akses jalan
4	Pengrajin Ikan Asin	1	Cuaca dan akses jalan
5	UMKM Pedagang Ikan	3	Akses jalan
6	UMKM Makanan Ringan	2	Kekurangan modal
7	UMKM Warung Kue	1	Kekurangan modal dan pemasaran
8	UMKM Warung Sembako	5	Kekurangan modal
9	UMKM Warung Makan	4	Kekurangan modal
Total KK		100	

Sumber: Laporan Agustus Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kegiatan ARA Tahun 2023

Adanya hambatan terkait kekurangan modal serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam bidang usaha perikanan menyebabkan para nelayan terpaksa mengandalkan pengepul ikan untuk menjual hasil tangkapannya meskipun secara mandiri sebetulnya mereka bisa lebih baik. Hal ini, seharusnya mendorong terbentuknya kelompok usaha seperti koperasi sebagai wadah

pengembangan kemampuan serta potensi masyarakat Desa Tengkurak khususnya bagi para nelayan.

Koperasi merupakan wadah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama nelayan melalui serangkaian program kegiatan koperasi, misalnya membangun sudut pandang masyarakat mengenai koperasi, penyedia atau membantu kebutuhan permodalan melalui program simpan pinjam, peminjaman sarana pendukung kebutuhan nelayan berupa alat *thermo king* dan tangkap ikan, fasilitator dalam membangun kerja sama dengan pihak terkait, serta sebagai media untuk meningkatkan pemasukan para nelayan (Arifandy et al., 2020).

Keterbatasan modal dan belum adanya wadah atau organisasi yang menampung hasil usaha perikanan Desa Tengkurak dapat didukung melalui pemberian akses pemodalannya maupun bantuan lain. Akses reforma agraria merupakan pendampingan usaha terhadap masyarakat. Pembentukan tim penanganan akses reforma agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang terdiri dari *field staff* dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Desa Tengkurak. Kegiatan yang dijalankan berupa penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model pengembangan akses reforma, dan penyusunan data penerima kelompok usaha di masyarakat.

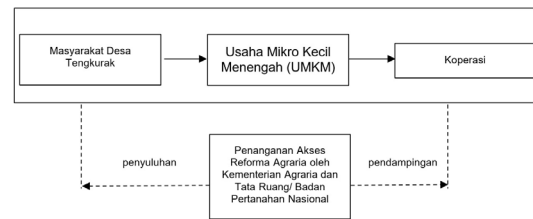
B. Strukturisasi Penanganan Akses Reforma Agraria dalam Organisasi

Melayani kepentingan publik merupakan tujuan dari sebuah organisasi birokrasi, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur sehingga mampu memperjelas posisi atau peran, tanggung jawab serta kewenangan masing-masing bidang. Dalam organisasi, alur formal dilakukan dalam berkomunikasi, bahkan sebagian besar dilakukan dengan komunikasi administrasi dibandingkan komunikasi verbal atau tatap muka sehingga tidak ada penyalahgunaan oleh sebagian pihak. Penanganan akses reforma agraria dalam sebuah organisasi meningkatkan koordinasi di jajaran ATR/BPN termasuk dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta menjalin komunikasi yang baik bersama masyarakat di wilayah penanganan akses reforma agraria.

Salah satu teori dari sekian banyak teori dalam komunikasi organisasi adalah teori strukturalisasi, menurut teori ini dalam diri setiap manusia melakukan tindakan dan perilaku akan mengikuti segala aturan dan konteks dimana sebuah interaksi atau pertukaran sosial itu terjadi (Ardiyanti, 2016). Strukturalisasi merupakan suatu hal produksi dan mereproduksi kembali sistem sosial melalui sumber daya oleh masyarakat dalam tindakan sosial sebagai penggunaan berbagai struktur yang dialaminya.

Praktek-praktek kegiatan keorganisasian dapat dipahami melalui pendampingan pembentukan kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pendampingan tersebut melalui penanganan akses reforma agraria dan pengadaan koperasi yang begitu penting untuk mendukung semua kegiatan atau usaha meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tengkurak khususnya para nelayan. Koperasi memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian dengan beberapa kegiatan yang dibentuk melalui koperasi seperti memberikan akses permodalan melalui program simpan pinjam serta pengembangan usaha (Perkasa & Harahap, 2023). Keberadaan koperasi begitu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tengkurak karena memiliki peranan penting dalam pengembangan potensi desa sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dikembangkan untuk masyarakat sehingga masyarakat mampu menginterpretasikan makna kehidupan dan memenuhi serta mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya (Hamid & Meilinda, 2023).

Tergambar pada Gambar 4 bahwa keberadaan koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan aspek fisik dan pemberdayaan sosial di tengah masyarakat. Aspek fisik seperti halnya pembangunan sarana serta prasarana yang ada di desa, sedangkan pemberdayaan usaha meningkatkan atau mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat sehingga terciptanya pengembangan secara mandiri (Sauri et al., 2023).



Gambar 4 Bagan Strukturalisasi Peranan di Desa Tengkurak

C. Difusi Inovasi sebagai Komunikasi Bisnis dalam Usaha Perikanan

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Tengkurak menghadapi kendala kurangnya pemenuhan sarana alat tangkap dan peralatan tambak. Oleh karenanya, perlu adanya pendampingan pelatihan pengembangan inovasi. Inovasi berupa sarana dan prasarana maupun pengembangan hasil usaha melalui media promosi.

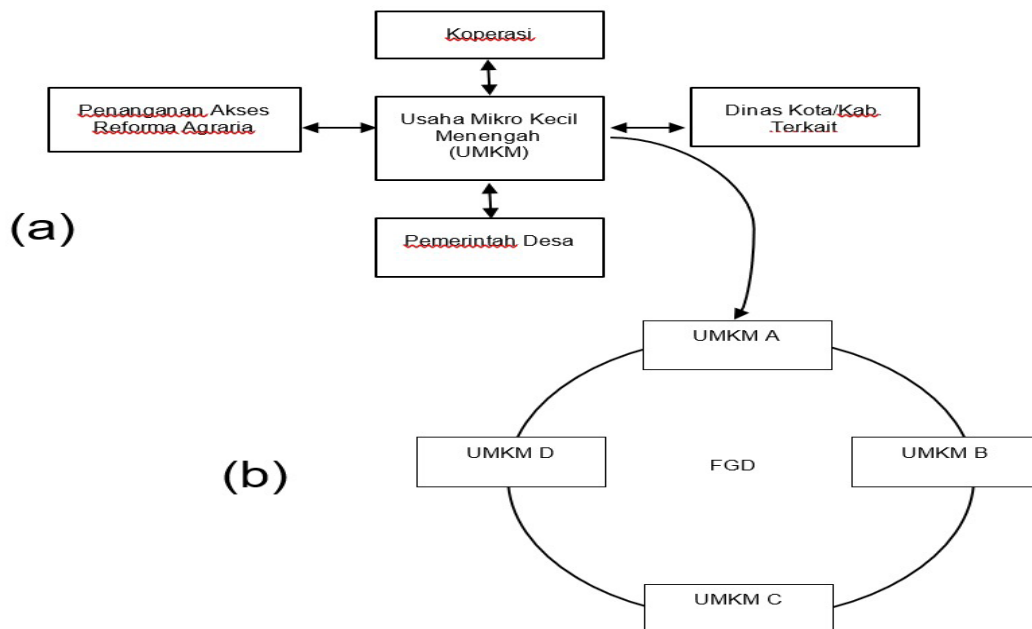
Difusi inovasi merupakan pembaruan ide, objek, dan praktek oleh kelompok atau individu kemudian diadopsi sebagai suatu proses pengkomunikasian sehingga membawa dampak terjadinya perubahan sosial (Muntaha & Amin, 2023). Pendefinisian tersebut di atas merupakan sebuah gambaran bahwa sebuah inovasi membutuhkan rentang waktu dapat diterima atau ditolak bagi sebagian kelompok masyarakat tergantung pada target atau penyesuaian kebutuhan serta kendala dalam proses mengadopsi. Selain waktu, hal penting lainnya dalam penerapan difusi inovasi adalah sebuah pesan yang hendak disampaikan kepada calon penerima (Prastyanti, 2023).

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Desa Tengkurak mengkomunikasikan kendala yang dihadapi. Keberhasilan berkomunikasi dapat berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat berupa sebuah difusi inovasi ke seluruh masyarakat dalam lingkungannya, sehingga dapat diterima dan melakukan penyesuaian serta adaptasi atas sebuah perubahan baru. Adanya pola penyebaran pesan dan aliran informasi merupakan strategi yang perlu diterapkan sebagai proses komunikasi yang efektif.

Pencapaian ketepatan (*accuracy*) dalam komunikasi adalah suksesnya usaha dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, terutama apabila terciptanya persamaan sikap dan bahasa (Safira & Trisninawati, 2023).

Pengembangan inovasi di Desa Tengkurak membutuhkan dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak terutama dari pemerintah setempat terkait kerja sama untuk penyebaran pesan dan pola aliran informasi hasil usaha UMKM. Pertama, dalam penyebaran promosi hasil UMKM Desa Tengkurak secara serentak mampu disebarkan melalui media yang dapat dipahami oleh masyarakat Desa Tengkurak, dengan menggerakkan *opinion*

leader atau pemuka pendapat di daerah tersebut dapat mempengaruhi penyampaian pesan yang diharapkan. Penyebaran pesan secara serentak secara umum lebih efisien dan efektif sebagai salah satu cara memberikan aliran informasi di sebuah kelompok atau organisasi (Pace, 2005). Kedua, aliran informasi promosi merupakan penyesuaian terkait siapa mengatakan apa kepada siapa sehingga dapat dipastikan penggunaan pola komunikasi yang tepat memiliki konsekuensi besar di masyarakat terutama sebuah kelompok usaha bersama, dalam hal ini adalah UMKM Desa Tengkurak. Pembahasan dan diskusi pengembangan inovasi dapat digambarkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Bagan Pola Roda UMKM dan OPD Terkait (a) dan Pola Lingkaran FGD UMKM (b)

Bagan dalam pola roda tersebut menjelaskan posisi sentral merupakan perwakilan atau ketua kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Desa Tengkurak dan kemudian diberikan penyuluhan atau pelatihan dari instansi atau pemerintah daerah yang terlibat sesuai dengan potensi usaha yang ditekuni, hal ini tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Desa Tengkurak sebagai pembina dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Desa melakukan program pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari tiga aspek yaitu pengembangan, pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat (Rahman, 2023). Pola roda memiliki pusat yang jelas, terpusatnya pesan dalam

pola ini mampu menjalankan komunikasi sehingga arus pesan yang terpusat merupakan satu-satunya informasi bagi seluruh anggotanya (Jamaludin, 2023).

Sedangkan aliran informasi dengan pola lingkaran yakni seluruh anggota kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Tengkurak melakukan komunikasi di dalam kelompok tanpa terkecuali. Hubungan atau akses terkait seluruh informasi terutama dalam pemecahan permasalahan, tidak semua anggota dapat melakukan lintas kelompok sehingga harus melalui kelompok lain yang berkaitan (Saleh, 2016). Dalam pola lingkaran *focus group discussion* (FGD) terkait inovasi usaha

begitu berpengaruh karena secara sederhana FGD fokus terhadap diskusi kelompok dan sistematis serta sangat spesifik sehingga informasi yang dikumpulkan lebih terarah dan kondusif. Kunci utama dalam FGD adalah diskusi, kelompok, dan tidak bebas atau fokus sehingga adanya pertemuan beberapa individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu solusi untuk satu tujuan bersama (Fitriani & Hanggara, 2023).

Selain itu FGD juga mampu efektif dalam memperkenalkan teknologi informasi digital sebagai sarana pengembangan usaha kelompok sebagai salah satu strategi “melek teknologi” bagi masyarakat Desa Tengkurak. Para peserta FGD tertarik untuk mengakses informasi digital kenelayanan serta penggunaan aplikasi peta laut maupun alat *fish finder*. Lebih lanjut, para peserta juga sepakat untuk belajar bersama literasi digital dan sosial kenelayanan melalui kelompok nelayan muda (Pepadu et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta analisis data bersama masyarakat Desa Tengkurak dalam penanganan akses reforma agraria, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama* masih perlunya dorongan pendanaan bagi kelompok usaha sehingga dibutuhkannya wadah sebagai usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengembangkan potensi di Desa Tengkurak. *Kedua*, membangun koperasi sebagai suatu organisasi penggerak pemberdayaan masyarakat dan tempat bersama mengelola hasil sumber daya serta usaha yang dilakukan bersama-sama. *Ketiga*, adanya pelatihan mengenai difusi inovasi mengikuti perkembangan zaman melalui metode *focus group discussion* (FGD) terkait segala permasalahan dan solusi bersama.

Kegiatan penanganan akses reforma agraria di Desa Tengkurak diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat dimulai dari membentuk kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) para nelayan, sehingga bisa menjadi sentra dan model usaha yang berkelanjutan. Sumber daya alam dan potensi usaha lainnya dapat dikelola dengan baik melalui kerja sama antara masyarakat dan organisasi perangkat daerah di Desa Tengkurak. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga turut serta sebagai pelaksana program penataan akses reforma

agraria. Dengan demikian, kerja sama tersebut dapat bermanfaat bagi kelompok usaha bersama di Desa Tengkurak. Kegiatan akses reforma agraria mampu meningkatkan serta memperbaiki kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial serta menata ulang ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah dalam akses permodalan sehingga terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik.

Dengan adanya komunikasi serta kerja sama antara masyarakat Desa Tengkurak dengan pemerintah serta instansi terkait, diharapkan masyarakat dapat mampu mengelola dan mempromosikan hasil usahanya secara mandiri terutama para nelayan, sehingga tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada pengepul. Pemerintah dan instansi terkait dapat menyokong kegiatan ini dengan membangun *website* atau media sosial lainnya bagi masyarakat Desa Tengkurak sebagai media promosi serta membantu pengembangan dan kualitas produk yang hendak dijual.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, H. (2016). *SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI (Studi di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah)* | Ardiyanti | Kajian. <https://doi.org/10.22212/kajian.v17i1.357>
- Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN: PERSPEKTIF MODAL KERJA. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Boa, H. (2007). *Analisis dampak sumber modal terhadap produksi dan keuntungan usaha tambak udang di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/9336>
- Fitriani, D., & Hanggara, G. S. (2023). Potensi Teknik Focus Group Discussion Dalam

- Mengurangi Perilaku Konsumtif. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 6, 2032–2039.
- Hamdani, H., Farmiati, J., Ismail, I., Bahgia, S., Hasbi, H., & Butar, A. B. (2020). PENDAMPINGAN PERMODALAN USAHA KOPERASI NELAYAN PINTAR BANDA ACEH. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v3i1.65>
- Hamid, I., & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Livelihood Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.13585>
- Jamaludin, A. (2023). *Pesan Dakwah Dalam Youtube Ferry Irwandi Pada Video "Abu Nawas Dan Kebahagiaan" Dalam Konteks Surat Muhammad Ayat 12* [bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74172>
- Kantor Pertanahan Kab. Serang (2023) *Laporan Bulan Agustus Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2023*. Kab. Serang: Kantor Pertanahan Kab. Serang.
- Mitra, A. (2021). Efektifitas pelaksanaan program penyuluhan perikanan dalam pemberdayaan masyarakat Nelayan Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian [JIMTANI]*, 1(2), Article 2. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimtani/article/view/228>
- Muntaha, N. G., & Amin, A. (2023). Difusi Inovasi, Diseminasi Inovasi, Serta Elemen Difusi Inovasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13624>
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules. (2005). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pepadu, J., Rosyadi, M. A., Syarifuddin, S., Ariessaputra, S., Syuhada, K., & Ramdan, D. (2023). Peningkatan Literasi Digital dan Sosial Melalui Fasilitasi Pembentukan dan Aktivasi Kelompok Nelayan Muda Desa Kuranji Dalang. *Jurnal Pepadu*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i2.2369>
- Perkasa, R. D., & Harahap, F. F. (2023). Pengaruh Koperasi terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Kota Tanjungbalai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13931–13936. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8607>
- Prastyanti, S. (2023). Difusi Inovasi dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2013.9.1.8255>
- Provinsi Banten. 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Banten Agustus 2022. Retrieved September 21, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Banten-Agustus-2022.aspx>
- Rachman, T. F., & Rosyanti, D. M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan UMKM Waroeng Aidina Di Sektor Ekonomi. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.55606/jubima.v1i3.1829>
- Rahman, A. R. (2023). Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi*

Dan Bisnis, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.47747/jismab.v4i3.1313>

Redistribusi Tanah, Memberikan Kepastian Hukum Serta Meningkatkan Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat—Fajar Banten. (n.d.). Retrieved September 21, 2023, from <https://www.fajarbanten.com/news/pr-1332424770/redistribusi-tanah-memberikan-kepastian-hukum-serta-meningkatkan-keadaan-sosial-ekonomi-masyarakat>

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016. (n.d.). Retrieved November 10, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40463/perpres-no-51-tahun-2016>

Safira, N., & Trisninawati, T. (2023). PERAN KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM MENINGKATKAN PENYULUHAN KELOMPOK TANI HUTAN PADA UPTD KPH WILAYAH III. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Vokasi (Semhavok)*, 5(1), Article 1.

Saleh, A. M. (2016). *Komunikasi dalam Kepemimpinan*

Organisasi. Universitas Brawijaya Press.

Sauri, S., Jamaludin, A., Rosita, D., Farha, H. M., & Jaelani, J. (2023). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.59653/jimat.v1i02.236>

Sinabariba, R., zaidar, & Kaban, M. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERMUKIMAN DI PESISIR PANTAI KOTA SIBOLGA (Studi di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 139–148.

Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>